

Peran UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dalam Menyikapi Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2023

Fany Anggun Abadi¹, Rifqi Itsnaini Yusuf², Intan Tiara Kartika³

Universitas Peradaban^{1,2}

Universitas Negeri Gorontalo³

Jl. Raya Pagojengan Km.3 Paguyangan Kec. Paguyangan Kab. Brebes^{1,2}

Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Gorontalo³

anggunabadi1998@gmail.com, anggunabadi1998@gmail.com, intantiarak@ung.ac.id.

Kata kunci

UNHCR, Pengungsi
Rohingya, Aceh,
Krisis Kemanusiaan

Abstrak

Krisis ini disebabkan oleh konflik etnis di Myanmar yang memaksa ribuan warga Rohingya mengungsi dan mencari perlindungan di negara tetangga, termasuk Indonesia. Fokus utama jurnal ini adalah mengevaluasi strategi dan upaya yang dilakukan UNHCR dalam menangani masalah ini di Aceh. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber. Analisis menunjukkan bahwa UNHCR telah memainkan peran yang signifikan dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Rohingya di Aceh. Namun, tantangan yang kompleks, seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi masyarakat terhadap keberadaan pengungsi, terus menjadi kendala dalam menyelesaikan krisis ini. Studi ini juga menyoroti pentingnya kerja sama antara UNHCR, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah dalam menangani masalah pengungsi secara efektif. Dengan demikian, jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang peran dan tantangan UNHCR dalam menanggapi krisis pengungsi Rohingya di Aceh serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik di masa mendatang.

Keywords

UNHCR, Rohingya
Refugees, Aceh,
Humanitarian

Abstract

This crisis is caused by ethnic conflicts in Myanmar, which have forced thousands of Rohingya people to flee and seek refuge in neighboring countries, including Indonesia. The primary focus of this journal is to

Crisis evaluate the strategies and efforts undertaken by UNHCR in addressing this issue in Aceh. Using a qualitative approach, data were collected from various sources. The analysis indicates that UNHCR has played a significant role in providing assistance and protection to Rohingya refugees in Aceh. However, complex challenges, such as limited resources and community resistance to the presence of refugees, continue to hinder the resolution of this crisis. This study also highlights the importance of collaboration between UNHCR, local governments, and non-governmental organizations in effectively addressing refugee issues. Thus, this journal provides valuable insights into the role and challenges of UNHCR in responding to the Rohingya refugee crisis in Aceh, along with recommendations for policy and practice improvements in the future.

PENDAHULUAN

Krisis pengungsi Rohingya di Aceh menjadi salah satu tantangan kemanusiaan yang mendesak bagi masyarakat global. Diperparah oleh konflik etnis yang membara di Myanmar, ribuan warga Rohingya terpaksa meninggalkan tanah air mereka dalam upaya mencari perlindungan di negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab atas perlindungan pengungsi, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memiliki peran penting dalam menangani krisis kemanusiaan ini.

Pada tahun-tahun terakhir, Aceh telah menjadi salah satu destinasi utama bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dan terjadi di Myanmar. Melihat hal ini, UNHCR bersama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya terlibat dalam berbagai upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan solusi jangka panjang bagi pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh.

Pendahuluan ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya peran UNHCR dalam menyiapkan krisis pengungsi Rohingya di Aceh. Selain itu, pendahuluan juga akan merangkum latar belakang konflik di Myanmar yang menjadi akar masalah dari gelombang pengungsian tersebut, serta menggarisbawahi kompleksitas dan tantangan yang dihadapi UNHCR dalam menjalankannya di lapangan.

Melalui pandangan yang mendalam terhadap peran UNHCR dalam menangani krisis pengungsi Rohingya di Aceh, diharapkan pendahuluan ini akan memberikan landasan yang kokoh bagi pemahaman lebih lanjut tentang dinamika dan kompleksitas masalah ini, serta memberikan dasar untuk analisis yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam jurnal ini

TEORI PENELITIAN

Teori Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Menurut Le Roy A. Bannet dalam bukunya "International Organization: Principles and Issue", organisasi internasional pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan dengan tertib dalam rangka mencapai tujuan

[20]

Fany Anggun Abadi, et. al.
Peran UNHCR...

bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar masing-masing kepentingan -masing-masing negara terjamin dalam konteks hubungan internasional. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk sebagai wadah kerjasama suatu negara untuk menjamin kepentingan negara-negara anggotanya. (Bennett, AL, 1984)

Sedangkan menurut Clive Archer dalam bukunya International Organizations , organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional. kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama, antarpemerintah yang berarti antarnegara atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan antar pemerintah yang disebut dengan hubungan transnasional. Ketiga, hubungan antar suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Kementerian Kesehatan) dengan suatu cabang pemerintah di negara lain (seperti Kementerian Kesehatan atau Badan Intelejennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri yang disebut transpemerintahan . Hubungan ketiga ini termasuk dalam hubungan internasional (Archer, C., 2002).

Teori Penyelesaian Konflik

Suatu teori lain tentang faktor penyebab konflik adalah teori konflik sosial berkesinambungan (Protected Sosial Conflict / PSC). Teori ini dikembangkan oleh Edward azar (1990) yang Merujuk pada kondisi-kondisi tertentu yang memicu timbulnya permusuhan antar kelompok komunal berupa kebencian rasial, etnik, kultur atau agama yang berlangsung lama dan sering kali mencuat dalam bentuk aksi-aksi kekerasan sporadis.

Menurut Azar ada empat variabel yang menjadi prakondisi timbulnya konflik sosial yang berkepanjangan (Protacted Sosial Conflict / PSC), yaitu: (1) Muatan komunal (Communal Content) , (2) Kebutuhan dasar manusia (Human Needs) , (3) Peran negara/ pemerintah (Pemerintahan dan Peran Negara) , (4) Keterkaitan internasional (Hubungan Internasional). (Henry Iwansyah, 2013)

Teori Resolusi Konflik

Teori resolusi konflik yang digunakan dalam artikel ini adalah teori Ralf Dahrendorf. Menurut Dahrendorf terdapat tiga cara dalam menyelesaikan suatu konflik, yaitu: 1. Konsiliasi, dimana penyelesaian suatu konflik dapat diwujudkan melalui dihadirkannya pihak ketiga seperti lembaga tertentu yang memungkinkan terjadinya diskusi dan menghasilkan keputusan diantara pihak-pihak yang berkonflik. 2. Mediasi, yaitu bentuk upaya penyelesaian konflik dengan menghadirkan mediator yang akan menemukan kepentingan dari masing-masing pihak untuk dirundingkan dengan tujuan memperoleh satu kesatuan keputusan terbaik. 3. Arbitrasi, yaitu menyelesaikan konflik dengan menghadirkan pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk memberikan keputusan tertentu yang bertujuan menyelesaikan konflik yang terjadi, dimana semua pihak yang berkonflik harus menerima keputusan akhir tersebut. (Olaf Kühne, LL, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif. Menurut (Creswell, 2014) kualitatif adalah pendekatan penelitian yang prosesnya terletak pada teks dan juga gambar dalam menginterpretasikan data yang diperoleh memerlukan seorang peneliti yang telah memahami subjek. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan dimana berasal dari berbagai sumber, seperti memperoleh data yang diinginkan melalui studi dokumentasi dan jejak digital.

Untuk mendapatkan data yang valid dari sumber data, maka perlu menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data (Sugiyono, 2010) Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah studi literatur (library Research) , peneliti mengumpulkan data dengan cara mengkaji literatur berupa buku, jurnal, artikel , dokumen, halaman atau website resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik di Myanmar dan Pengungsi Rohingya

Konflik di Myanmar dan pengungsi Rohingya terjadi sejak lama dan mempengaruhi negara-negara sekitar, termasuk Indonesia. Konflik ini merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk konflik antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya, peran ulama dan politik, dan sistem pemerintah yang tidak terbuka. Pengungsi Rohingya yang mengalami perlakuan buruk di Myanmar telah meninggalkan negeri dan mencari perlindungan di negara sekitar, termasuk Indonesia.

Pada tahun 2015, pengungsi Rohingya yang mengalami perlakuan buruk di Myanmar meninggalkan negeri dan mencari perlindungan di negara sekitar, termasuk Indonesia. Pada saat itu, pemerintah Indonesia menolak kedatangan pengungsi Rohingya ketika mereka sampai dekat Provinsi Aceh sebagai bentuk perlindungan terhadap wilayahnya. Namun, beberapa tahun kemudian, Thailand dan Malaysia berhenti menerima pengungsi Rohingya, dan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerima para pengungsi (Listiarani, T., 2021)

Pada tahun 2017, terjadinya krisis kemanusiaan Rohingya yang disebabkan oleh serangan kelompok militer Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) yang menyerang pos pengawalan militer Myanmar pada 25 Agustus 2017. Akibatnya, gelombang eksodus pengungsi Rohingya terus berdatangan dari Rakhine State menuju Banglades. Pemberitaan mengenai krisis kemanusiaan Rohingya menjadi kontroversi, dan pihak pemerintah Myanmar menyatakan adanya disinformasi, sementara jumlah pengungsi Rohingya terus bertambah meninggalkan Myanmar (Prihandini, F., & Junaedi, F., 2019)

Konflik ini juga dipengaruhi oleh tekanan internasional yang mengharapkan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN dan perwakilan tidak tetap DK PBB untuk bisa ikut serta dalam

menyelesaikan konflik Rohingya. Dalam hal ini, keputusan Indonesia untuk memilih kebijakan terbuka ini dipengaruhi oleh tekanan internasional, serta latar belakang kesamaan agama, Tingginya antusiasme masyarakat, dan sistem politik yang bersifat inward-looking dan berorientasi pada masyarakat (Listiarani, T., 2021).

Myanmar telah lama dinodai oleh konflik etnis dan agama yang kompleks, yang menjadi dasar bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari negara itu. Konflik dihilangkan dalam sejarah panjang kolonialisme, politik internal yang kompleks, dan ketegangan antara kelompok etnis mayoritas dan minoritas.

Kolonialisme dan Pembagian Etnis: Sejarah kolonialisme di Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, telah meninggalkan warisan yang rumit. Pembagian etnis oleh penjajah Inggris, yang memperlakukan beberapa kelompok sebagai penguasa dan yang lainnya sebagai terpinggirkan, menciptakan dasar bagi ketegangan etnis yang berkepanjangan. (Juanda, O., 2021).

Perjuangan Kemerdekaan dan Konflik Internal: Setelah kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, Myanmar berjuang dengan konflik internal yang melibatkan pemerintah pusat, militer, dan kelompok etnis bersenjata yang ingin otonomi atau kemerdekaan. Konflik ini menimbulkan kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. (Farrelly, N., 2014).

Diskriminasi Terhadap Rohingya: Kelompok etnis Rohingya, yang sebagian besar Muslim, telah lama menjadi target diskriminasi di Myanmar, terutama setelah dinyatakan sebagai kelompok yang tidak diakui secara resmi oleh pemerintah pada tahun 1982. Mereka melakukan komunikasi komunikasi akses terhadap layanan dasar, dan sering menjadi target kekerasan. (Gorlick, B., 2019).

Eskalasi Kekerasan: Pada tahun 2017, eskalasi kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap Rohingya menyebabkan krisis kemanusiaan yang meluas. Ribuan orang terbunuh, desa-desa dibakar, dan sebagian besar warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari kekerasan tersebut. (Nartey, EK, 2022).

Ketegangan Internasional: Krisis Rohingya telah menarik perhatian internasional dan menyebabkan kritik yang tajam terhadap pemerintah Myanmar. Namun, respons internasional terhadap krisis ini juga bervariasi, dengan beberapa negara menawarkan bantuan dan perlindungan bagi pengungsi Rohingya, sementara yang lain masih menjalin hubungan dagang dengan Myanmar. (Ibrahim, H., & Nordin, R., 2015).

Sejarah Aceh Sebagai Tempat Perlindungan Pengungsi

Aceh sebagai tempat perlindungan pengungsi terdapat dalam sejarah di Bukittinggi, Sumatera Barat, dengan adanya "Lubang Jepang" atau "Lubang Japang" yang digunakan sebagai lubang perlindungan atau tempat pemakaman para pengungsi Jepang (Yurita, FY dkk, 2014). Namun, dalam konteks hukum internasional, perlindungan pengungsi di Indonesia bergantung pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang menjelaskan tentang status pengungsi prima facie . Pada saat konflik bersenjata, pengungsi yang datang

'secara massal' sulit untuk menentukannya secara perorangan, dan status pengungsi ditentukan berdasarkan fakta di lapangan (Justinar, J., 2019).

Aceh, sebagai wilayah terluas di Sumatera Utara, telah melayani sejumlah besar pengungsi sepanjang sejarahnya. Sejak abad ke-16, Aceh telah menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi dari berbagai wilayah, termasuk dari Pulau Jawa, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Aceh juga telah menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi dari peristiwa alam, seperti gempa bumi dan banjir. Pada tahun 2004, Aceh mengalami gempa bumi dan banjir yang menyebabkan banyak pengungsi dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Pulau Jawa meninggalkan rumah mereka dan pindah ke Aceh.

Aceh juga telah menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi dari konflik politik, seperti peristiwa penggagasan di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Aceh telah menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi selama sejarahnya, dari konflik, peristiwa alam, dan konflik politik. Bagi pengungsi, Aceh adalah wilayah yang menyediakan tempat perlindungan dan mulai dari abad ke-16 hingga saat ini.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungsi Menuju Aceh

Peristiwa Alam: Gempa bumi dan banjir yang terjadi di daerah lain , seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Pulau Jawa, yang menyebabkan pengungsi meninggalkan rumah mereka dan pindah ke Aceh (Alfarisi, S.dkk, 2022).

Konflik dan Peristiwa Politik: Perang dan peristiwa politik yang terjadi di daerah lain , seperti perang di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan, yang menyebabkan pengungsi meninggalkan rumah mereka dan pindah ke Aceh (Alfarisi, S.dkk, 2022).

Ekonomi: Kondisi ekonomi yang lebih baik di Aceh, seperti pembelian logam mulia yang tinggi di PT. Pegadaian Syariah Blang Pidie, yang membuat minat pembelian logam mulia semakin meningkat setiap tahunnya. (Jasiska, S., & Damrus, D., 2022).

Bantuan Kemanusiaan

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dalam membantu para pengungsi Rohingya tersebut, tentunya atas dasar perkembangan yang terjadi di dalam negeri Indonesia sendiri yang memang sebagian besar masyarakat Indonesia menginginkan agar para pengungsi yang terdampar di pantai-pantai Aceh itu segera dibantu. Langkah-langkah teknis tersebut terdiri dari upaya menyelematkan, mendata, Berkoordinasi dengan UNHCR, Internasionalisasi pengungsi Rohingya, Mengeluarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Memfasilitasi ke Rumah Detensi Imigrasi Medan. (Zulkarnain, SIP, 2019).

Terhitung sejak tahun 2009, nelayan Aceh telah berulang kali menyelamatkan rombongan pengungsi yang terdampar ini. Aksi heroik kemanusiaan yang dilakukan nelayan Aceh ini akhirnya mendapat perhatian dunia. Tanpa memperdulikan larangan otoritas laut, nelayan Aceh membantu para pengungsi yang terkatung-katung dengan mengedepankan semangat kemanusiaan (Yayasan Geutanyoe, 2016). Pada saat nelayan Aceh menemukan

perahu manusia Rohingya di tengah laut, mereka berada dalam posisi penghalauan TNI AL dan AL Malaysia agar keluar dari zona laut masing-masing negara. Namun pada saat yang sama, nelayan Aceh berjanji memberikan bantuan kepada para pengungsi dan dibawa ke pantai-pantai daratan Aceh.

Misalnya, Pemerintah Daerah Lhokseumawe mendonasikan lahan untuk menampung ratusan orang yang datang dalam sebuah penampungan komunitas yang terintegrasi Intergrated Community Shelter (ICS) di Blang Adoe, yang dibangun untuk menampung warga Rohingya. Selain itu, banyak organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah turut bekerja membantu kebutuhan pokok Rohingya, seperti papan, pangan, udara, kesehatan, dan pendidikan .

Kerja sama antara UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), pemerintah lokal, dan organisasi non-pemerintah (NGO) sangat penting dalam menangani masalah pengungsi. Berikut adalah beberapa bentuk kerjasama yang biasanya terjadi.

Pemberian Bantuan dan Perlindungan: UNHCR, pemerintah lokal, dan LSM sering bekerja sama dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi. Hal ini mencakup penyediaan makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan terhadap kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi. (Hovil, L., & Maple, N., 2022)

Penyediaan Informasi dan Pendidikan: Pihak ketiga dapat bekerja sama dalam menyebarkan informasi kepada pengungsi tentang hak-hak mereka, prosedur imigrasi, dan layanan yang tersedia. Selain itu, mereka juga dapat memberikan pendidikan formal atau informal kepada anak-anak pengungsi untuk memastikan akses mereka terhadap pendidikan. (Alunaza, H., & Juani, MK, 2017).

Pengembangan Kebijakan dan Advokasi: UNHCR, pemerintah lokal, dan LSM dapat bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang memperbaiki kondisi pengungsi dan mempromosikan hak-hak mereka. Mereka juga dapat melakukan advokasi bersama untuk mendukung kebijakan yang pro-pengungsi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. (Gibney, M., & Hansen, R. Ed., 2005).

Pengelolaan Kamp Pengungsi dan Pemukiman: Di tempat-tempat yang memiliki kamp pengungsi atau pengungsi, UNHCR, pemerintah lokal, dan LSM sering kali bekerjasama dalam mengelola fasilitas-fasilitas tersebut. Hal ini mencakup penyediaan layanan dasar, pemeliharaan infrastruktur, serta pemantauan dan penanganan masalah-masalah keamanan dan kesejahteraan. (Forsberg, E., 2020).

Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas: UNHCR dan LSM sering memberikan pelatihan kepada staf pemerintah lokal, relawan, dan tenaga kerja lokal lainnya dalam menangani masalah pengungsi dengan efektif. Ini termasuk pelatihan di bidang-bidang seperti kesehatan mental, layanan psikososial, dan manajemen krisis. (Ferris, EG, 2011).

Pendanaan dan Penggalangan Dana: Pemerintah lokal dan LSM sering kali mengandalkan dana dari UNHCR serta donor internasional lainnya untuk mendukung program-program mereka yang berhubungan dengan pengungsi. UNHCR juga dapat

memberikan bantuan keuangan langsung kepada pemerintah lokal dan LSM untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait pengungsi. (Tren, G., 2016).

Kerjasama yang efektif antara UNHCR, pemerintah lokal, dan LSM penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi dan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.

Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang terkait pengungsi Rohingya di Aceh terkait dengan ketidaksanggupan menampung jumlah pengungsi, kelayakan sarana dan prasarana, dan perlunya standar internasional (Faisal, F., dkk, 2023). Penanganan kolaboratif yang melibatkan Indonesia, masyarakat Aceh, dan organisasi internasional dalam menghadapi gelombang pengungsi internasional Rohingya yang terdampar di Aceh saat itu.

Dari perspektif masyarakat, tingkat kesadaran yang signifikan di antara para responden, dengan 75% mengakui adanya kebijakan pemerintah Indonesia, tetapi perspektif yang beragam muncul dengan dampak positif, netral, dan negatif (Syarifuddin, S., dkk, 2023). Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh untuk penanganan bencana banjir memperkuat alasan penolakan, didampingi dengan tuntutan tegas dari Pemerintah Kabupaten Aceh kepada pemerintah Indonesia untuk merespons kebijakan ini (Mamis, S., dkk, 2023).

KESIMPULAN

Krisis pengungsi Rohingya di Aceh menunjukkan tantangan kemanusiaan yang mendesak, di mana ribuan warga Rohingya meninggalkan Myanmar akibat konflik dan etnis tertentu. Dalam penanganan krisis ini, peran UNHCR sangat penting dalam menyediakan bantuan kemanusiaan dan perlindungan. Konflik di Myanmar tertanam dalam sejarah kolonialisme, politik internal yang kompleks, dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Eskalasi kekerasan pada tahun 2017 memberikan situasi kemanusiaan dan menarik perhatian internasional. Sebagai destinasi utama bagi pengungsi, Aceh telah menjadi tempat perlindungan sepanjang sejarahnya, baik dari konflik, peristiwa alam, maupun konflik politik. Faktor-faktor seperti peristiwa alam dan konflik politik di daerah lain , serta kondisi ekonomi yang lebih baik, mendorong pengungsi menuju Aceh. Pemerintah Indonesia bersama UNHCR dan organisasi non-pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk membantu pengungsi Rohingya, termasuk menyediakan tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Meskipun demikian, penanganan krisis ini juga menimbulkan hambatan, seperti rendahnya jumlah penampungan pengungsi yang besar, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan perlunya standar internasional. Terdapat peluang dalam penanganan kolaboratif antara Indonesia, masyarakat Aceh, dan organisasi internasional dalam menghadapi krisis pengungsi ini. Namun, terdapat pula perspektif yang beragam di

masyarakat dalam penanganan krisis ini, dengan beberapa dampak positif, netral, dan negatif yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

Melalui kerjasama efektif antara UNHCR, pemerintah lokal, dan LSM, diharapkan kebutuhan dasar pengungsi dapat terpenuhi dan mereka mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak asasi manusia. Meskipun demikian, tantangan dan peluang dalam menangani krisis pengungsi Rohingya di Aceh perlu terus dipantau dan diatasi untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan yang lebih baik bagi pengungsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, S., Rahmaddiansyah, R., & Jakfar, F. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Emping Melinjo di Kabupaten Pidie dan Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 7 (4), 579-591.
- Alunaza, H., & Juani, MK (2017). kebijakan pemerintah Indonesia melalui sekuritisasi migrasi pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015. *Perspektif Indonesia*, 2 (1), 1-17.
- Archer, C. (2002). *Organisasi internasional*. Routledge
- Bennett, AL (1984). *Organisasi internasional; prinsip dan isu*.
- Creswell, J. (2014). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*. Los Angels: SAGE Publications.
- Faisal, F., Mukhlis, M., Muammar, M., Zulfadli, Z., Putri, RA, & Putra, AJ (2023). Diskusi Kelompok Terfokus; Peluang, Tantangan dan Strategi Upaya Penyelamatan Pengungsi Luar Negeri di Laut. *Jurnal SOLMA*.
- Farrelly, N. (2014). Kerjasama, kontestasi, konflik: Kepentingan politik etnis di Myanmar saat ini. *South East Asia Research*, 22 (2), 251-266.
- Ferris, EG (2011). *Politik perlindungan: Batasan tindakan kemanusiaan*. Brookings Institution Press.
- Forsberg, E. (2020). *Aktor keamanan dalam konteks yang rapuh*.
- Geutanyoe, Y. (2016). *Hidup dalam penantian: Setahun pengungsi Rohingya di Aceh*. Aceh: Yayasan Geutanyoe .
- Gibney, M., & Hansen, R. (Eds.). (2005). *Imigrasi dan Suaka: Dari Tahun 1900 hingga Sekarang* (Volume 1). ABC-CLIO.
- Gorlick, B. (2019). Krisis pengungsi Rohingya: memikirkan kembali solusi dan akuntabilitas. *Refugee Studies Centre, Working Paper Series*, (131).
- Henry Iwansyah (2013) *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara* (Lampung: Percetakan Osa), h. 13
- Hovil, L., & Maple, N. (2022). *Integrasi lokal: Solusi tahan lama yang memerlukan pemulihan* . *Survei Pengungsi Triwulan*, 41 (2), 238-266.
- Ibrahim, H., & Nordin, R. (2015). Prinsip tanggung jawab untuk melindungi: Kasus Rohingya di Myanmar. *Jurnal Pertanika Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2 (1), 1-18.

- Jasiska, S., & Damrus, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Logam Mulia Di Pt Pegadaian Syariah Blang Pidie Aceh Barat Daya. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 11 (1), 1-4.
- Juanda, O. (2021). Kekejaman Militer Myanmar terhadap Rohingya berdasarkan Hukum Pidana Internasional. NEGREI: *Jurnal Akademik Hukum dan Tata Kelola*, 1 (2), 111-124.
- Justinar, J. (2019). Perlindungan Pengungsi Di Wilayah Konflik Bersenjata Dan Penentuan Status Prima Facie. terAs Law Review: *Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 1 (1), 54-84.
- Listiarani, T. (2021). Analisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya di Indonesia. *Jurnal PIR: Kekuasaan dalam Hubungan Internasional*, 5 (1), 19-32.
- Mamis, S., Rustan, AS, Aronus, SH, & Basri, H. (2023). Framing Media Dan Dinamika Opini Publik TerkaitPengungsi Rohingya Di Indonesia: Perspektif UNHCR Dan Otoritas Aceh Dalam Sorotan Kritis. *Wardah*, 24 (2), 137-163.
- Nartey, EK (2022). Krisis Rohingya: Analisis Kritis Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. *Athens JL*, 8 , 449.
- Olaf Kühne, LL (2020). *Ralf Dahrendorf: Antara Teori Sosial dan Praktik Politik*. Springer Penerbitan Internasional.
- Prihandini, F., & Junaedi, F. (2019). Bingkai Berita Kemanusiaan dalam Harian Kompas dan Republika Terhadap Pengungsi Rohingnya (Analisis Framing Pada Berita Kompas dan Republika Edisi 6–11 September 2017 Mengenai Pengungsi Rohingnya). *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 10 (2), 133-148
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan* . Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, S., Cahyono, AS, & Pahrial, R. (2023). Analisis Kebijakan Negara Indonesia dalam Penyelesaian Kasus Pengungsi Rohingya dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2 (12), 1159-1168.
- Tren, G. (2016). *Pengungsian paksa pada tahun 2016*. UNHCR: Jenewa, Swiss .
- Yurita, FYF, Ibrahim, BIB, & Bunari, B. (2014). Sejarah "Lubang Japang" sebagai Tempat Perlindungan dari Sekutu di Bukittinggi Tahun 1942-1945 (*Disertasi Doktor*, Universitas Riau).
- Zulkarnain, SIP (2019). Disertasi dengan judul:"Penanganan Pengungsi Internasional Rohingya Myanmar Yang Terdampar di Aceh Tahun 2015" (*Disertasi Doktoral*, Universitas Nasional).
- Zulkarnain, Z., & Kusumawardhana, I. (2020). Jurnal Nasional (SINTA 2) dengan Judul: " BERSAMA UNTUK KEMANUSIAAN: PENANGANAN LINTAS SEKTOR TERHADAP MASALAH PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH 2015 (Together for Humanity: Kolaborasi Lintas Sektor Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh 2015)". BERSAMA UNTUK KEMANUSIAAN: PENANGANAN LINTAS SEKTOR TERHADAP MASALAH PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH 2015 (Bersama untuk Kemanusiaan: Kolaborasi Lintas Sektor Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh 2015), 11 (1), 67-83.